

RENJA

RENCANA KERJA
Tahun Anggaran 2026



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KOTA BEKASI



KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan Masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plofon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Bekasi Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi, yang selanjutnya akan memberikan Gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan. Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 pada tahun berikutnya.

Bekasi, 13 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dr. Rita Hartati., M.M
NIP.196806281994032012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usaha Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	8
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	29
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bekasi	42
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target DISKOPUKM Kota Bekasi Tahun 2026	46
3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027	53
4.1	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah. Renja organisasi perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dirumuskan dalam renja organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pendekatan kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, untuk menjalin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Rencana Kerja Diskopukm Tahun 2026 dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman dengan regulasi dimaksud.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan, yang dalam teknis

pelaksanaannya perlu dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renja. Penyusunan Renja perangkat daerah dilakukan melalui urutan : (i) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (iii) Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada rancangan RKPD, Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara keseluruhan Renja perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi sersta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi dan usaha kecil menengah. Dokumen ini memuat kebijakan, program, serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, baik secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun melalui sinergi dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, sehingga tercapai konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan tahunan. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan berpedoman pada indikator sasaran kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah:

1. Menerjemahkan arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi yang tercantum dalam Renstra 2025–2029 menjadi program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026

2. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dalam menjalankan pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan koperasi serta UMKM sesuai prioritas pembangunan daerah;
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah dalam sektor koperasi dan UMKM;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Renstra OPD.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Koperasi, dan UMKM merupakan penggerak ekonomi kerakyatan, memiliki kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Dinas pengampu urusan Koperasi, dan UMKM yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro dan fasilitasi UKM dan bidang Usaha Informal dalam melaksanakan pelayanan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, yaitu:

1. UMKM kurang melakukan inovasi dan Pemanfaatan teknologi produksi masih rendah;
2. UMKM mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa);
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran online;
4. Masih banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya branding, standarisasi dan sertifikasi produk bagi usahanya;
5. Lemahnya manajemen tata kelola perkoperasian;
6. Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam;
7. Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang;
8. Terbatasnya lokasi usaha bagi pelaku usaha Informal;
9. Jumlah usaha sektor informal sangat banyak dan cenderung meningkat;
10. Rendahnya Pemahaman Pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku;
11. Pelaku usaha cenderung berpindah-pindah dan tidak teratur;
12. Adanya Perubahan Kebijakan dalam Pemberdayaan PKL;
13. Kurangnya sinergitas antar OPD dalam penataan PKL.

Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan Indikator yaitu Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mencapai Rp 13.900.511.220,00 untuk pelaksanaan 8 (delapan) program, 12 (dua belas) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan sebesar Rp 12.010.576.199,00 dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 86.40% dan capaian kinerja fisik sebesar 99.89%.

Sementara pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024 untuk pelaksanaan 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 24 (dua puluh empat) sub kegiatan anggaran belanja adalah sebesar Rp 12.785.258.830,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86.06% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Capaian realisasi beberapa program mengalami penurunan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 realisasinya mencapai 83.53% menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 93.24%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang memasuki usia pensiun sehingga penyerapannya mengalami penurunan. Capaian realisasi program pengawasan dan pemeriksaan koperasi mengalami penurunan disebabkan oleh adanya kendala terbatasnya SDM. Bidang Koperasi sebagai penanggung jawab program pengawasan dan pemeriksaan koperasi hanya memiliki 2 (dua) orang pejabat fungsional yang telah memiliki kompetensi. Tahun 2024 sasaran strategis yang ditetapkan terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu : (1) ”Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM” (2) Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM”, merupakan sasaran srategis yang baru karena berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sehingga sasaran dan indikatornya berbeda dengan tahun 2023. Namun beberapa program dan kegiatan masih selaras dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
1.01	Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	-	-
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100	100	100	-	-
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/Bulan	776 Orang/Bulan	668 Orang/Bln	668 Orang/Bln	100	828 Orang/Bulan	-	-
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	-	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	100	-	-
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	-	-	-	8 Orang	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	82.20	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	-	-
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	120 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	-	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.10	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12 Dokumen	-	-
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100	-	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	28 Unit	28 Unit	100	2 Unit	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	-	-
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	12 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	-	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45 Unit	50 Unit	50 Unit	100	50 Unit	-	-
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	2.00	76.67	2	0.43	21.5	2.00	-	-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Izin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	100 Unit Usaha	76.67	23 Koperasi	5 Koperasi	21.5	100 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	150 Unit	23 Koperasi	5 Koperasi	21.5	100 Unit Usaha	-	-
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10.00	100	10	10.07	100	10.00	-	-
2.17.03.2.01	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	100	116 Unit Usaha	116 Unit Usaha	100	116 Unit Usaha	-	-
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Keukuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/ Kota	-	100 Unit	116 Unit Usaha	116 Unit Usaha	100	116 Unit	-	-
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4.00	100	4	4.34	100	4.00	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	65 Unit Usaha	100	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100	65 Unit Usaha	-	-
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	65 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100	65 Unit Usaha	-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	3.00	100	3	4.34	100	3.00	-	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	720 Orang	100	150 Orang Pengurus	150 Orang Pengurus	100	720 Orang	-	-
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	720 Orang	600 Orang	150 Orang Pengurus	150 Orang Pengurus	100	300 Orang	-	-
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Skala Usahanya	0.2	87.73	0.2	0.2	100	0.20	-	-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti seluruh Pendidikan Perkoperasian	1.050 Unit Usaha	143 Unit Usaha	1.050 Unit Usaha	1.050 Unit Usaha	100	135 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050 Unit Usaha	143 Unit Usaha	1.050 Unit Usaha	1.050 Unit Usaha	100	135 Unit Usaha	-	-
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Peresentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	10.00	100	10	12.38	123.8	10.00	-	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan	10.00	100	10	12.38	123.8	10.00	-	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	65 Unit Usaha	-	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	-	75 Unit Usaha	-	-	-	50 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	75 Unit Usaha	60 Orang	75 Orang	75 Orang	100	19 Unit Usaha	-	-
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	279 Orang	231 Orang	231 Orang	100	97 Orang	-	-
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1	100	0.1	0.1	100	0.1	-	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1	100	0.1	0.1	100	0.1	-	-
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	167 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	48 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	32 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	208 Unit Usaha	1.152 Unit Usaha	640 Unit Usaha	640 Unit Usaha	100	900 Unit Usaha	-	-

Sumber data: Olahan Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 8 (delapan) program, 12 (dua belas) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) indikator program dan 1 (satu) indikator kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Target program kegiatan yang tidak memenuhi target adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan indikator Kinerja Persentase Koperasi yang memiliki Izin simpan Pinjam, dihitung dengan rumus: Jumlah Koperasi yang memiliki izin simpan pinjam tahun ke-n dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (8.17%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 1.63%. Indikator kinerja persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam tidak tercapai karena disebabkan oleh proses moratorium Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan September, dan di bulan November dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM tentang Self Declare. Self declare ini mendorong koperasi untuk melakukan pernyataan bahwa koperasi tersebut melakukan operasional secara tertutup atau terbuka. Jika tertutup artinya koperasi hanya melayani anggotanya saja dengan pengawasan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan pelayanan operasional terbuka artinya koperasi dapat melayani masyarakat luas dengan pengawasan OJK. Hal inilah yang menjadi hambatan terbitnya izin simpan pinjam. Dari target 50 koperasi yang memiliki izin simpan pinjam hanya 10 koperasi yang terealisasi.

2. Program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 8 (delapan) program, 12 (dua belas) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) indikator program, 10 (sepuluh) indikator kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, diantaranya :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota**, dengan indikator Kinerja Optimalisasi Disiplin Aparatur, dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Indikator Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023

(100%) dengan 33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Indikator Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Indikator Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dihitung dengan rumus: Capaian Kegiatan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (100%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100%.

- b. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi**, dengan Indikator kinerja: Peningkatan Skala Usaha Koperasi. Dihitung dengan rumus: Koperasi yang skala usahanya meningkat dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dijumlahkan. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (2 unit) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar dua unit karena adanya pembinaan dan 40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 pendampingan, peningkatan skala usaha koperasi ini dilihat dari aspek Permodalan, volume Usaha, dan aset.
- c. **Program Penilaian KSP/USP Koperasi** dengan indikator Kinerja Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya, dihitung dengan rumus: jumlah Koperasi yang Tersertifikasi Kesehatannya pada tahun ke-n dibagi jumlah keseluruhan koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (8.17%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 8.17%. jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 50 unit dibagi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 612 unit x100 menghasilkan angka 8.17%.
- d. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan indikator Kinerja Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke-n. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (100 unit) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100 unit.
- e. **Program Pengembangan UMKM** dengan indikator *Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif*. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pelaku UMKM kreatif dibagi jumlah pelaku UMKM keseluruhan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2022 (5%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 5% karena jumlah pelaku UMKM meningkat 50 unit usaha dari data awal 1000 unit usaha, *Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil*.

Dihitung dengan rumus: Jumlah Usaha Mikro yang menjadi skala usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (1%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 1%, Skala usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil jumlahnya mencapai 21 unit usaha.

- f. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan indikator Kinerja Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan. Dihitung dengan rumus: Jumlah PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan dibagi jumlah PKL keseluruhan dikali 100%. target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (10%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 11.09%.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sementara untuk indikator yang melebihi target kinerja yang direncanakan, terdapat 2 (dua) indikator program adalah :

- a. **Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian** dengan Indikator kinerja Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke-n. Target 65 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (100 orang pengurus) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 150 orang pengurus.
- b. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan indikator Kinerja Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan. Dihitung dengan rumus: Jumlah PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan dibagi jumlah PKL keseluruhan dikali 100%. target outcome yang ditetapkan pada tahun 2023 (10%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 11.09%, karena telah dilakukan penataan PKL di Jl. Pulo Sirih RT 005 RW 015 perumahan Taman galaxy indah sebanyak 18 PKL/ unit usaha, RW 30 Perumahan Boulevard Hijau Kelurahan Pejuang sebanyak 20 PKL/unit usaha, Danau Cipeucang RW 22 Kelurahan Cimuning sebanyak 12 PKL/unit usaha dan Jl. Persatuan Komplek Depnaker/Jl. Raya Pekayon Rt 002/05 Kelurahan Jakasetia sebanyak 8 PKL/unit usaha.

Sementara berdasarkan perkiraan realisasi capaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil diperkirakan capaian kinerja sampai tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mendorong penguatan kemitraan, misalnya melalui kerjasama dengan Bea Cukai, dimana mereka memiliki program-program pendukung UMKM;
2. Melakukan updating data pelaku usaha dan koperasi;
3. Realisasi fisik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah mencapai 100% dari target 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 86.06% dari target 100%, sehingga diperlukan evaluasi untuk perbaikan di triwulan berikutnya;
4. Diskopukm didorong untuk melakukan leveling UMKM, Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan FGD dengan mengundang orang-orang yang paham UMKM naik kelas.

Terpenuhi dan terlampauinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Renja Diskopukm tahun 2023 antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Kapasitas aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait;
3. Kolaborasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan stakeholder terkait antara lain dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan inovasi.

Sementara faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah kebijakan pola minimal dalam pencapaian kinerja yang merupakan kebijakan yang muncul sebagai sebagai tindaklanjut atas terbitnya Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dasar penerbitan kebijakan ini adalah karena banyaknya oknum yang menyalahgunakan koperasi simpan pinjam, serta banyak ditemukan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat terlihat sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan laporan kinerja (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan telah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah di tentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil kajian, capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menunjukkan hasil yang baik. Indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan SPM telah tercapai, antara lain:

- a. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Waktu penyelesaian pelayanan rata-rata 3 hari, lebih cepat dari target 5 hari kerja;
- c. Jumlah koperasi yang terdaftar dan aktif meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu kajian terhadap IKK menunjukkan bahwa:

- a. Persentase koperasi yang meningkat usahanya mencapai 80%, melebihi target 70%;
- b. Jumlah wirausaha baru yang terbentuk mencapai 500 orang, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berdampak positif pada Masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan Upaya berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2024 (n-2)	Th 2025 (n-1)	Th 2026 (n)	Thn 2027 (n+1)	Th 2024 (n-2)	Th 2025 (n-1)	Th 2026 (n)	Th 2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam			2.5 %	2.5 %	2.5 %	-	0.43 %	n/a	2.5 %	-	Proses motarium Kementerian Koperasi dan UKM dampai dengan bulan September, dan di bulan November dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM tentang <i>Self Declare</i>
2	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi			-	2.5%	2.5%	2.5%	-	n/a	2.5%	2.5%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
3	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya			0.2 %	0.2 %	0.2 %	-	0.3 %	n/a	0.2 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi			-	1.5%	2%	2%	-	1.5%	2%	2%	
5	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			0.1 %	0.1 %	0.1 %	-	0.1 %	n/a	0.1 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
6	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditentukan			10%	10%	10%	10%	12.38%	n/a	10%	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
7	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian			10 %	10 %	10 %	-	10.07 %	n/a	10 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
8	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan			-	10%	10%	10%	-	10%	10%	10%	
9	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatanya			4 %	4 %	-	-	4 %	n/a	-	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
10	Persentase Pengurus Koperasi yang Telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian			3 %	3 %	3 %	-	4.34 %	n/a	3 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2024 (n-2)	Th 2025 (n-1)	Th 2026 (n)	Thn 2027 (n+1)	Th 2024 (n-2)	Th 2025 (n-1)	Th 2026 (n)	Th 2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya			-	8.5%	8.5%	8.5%	-	8.5%	8.5%	8.5%	
12	Persentase Koperasi yang Berkualitas			-	20%	20%	20%	-	n/a	20%	20%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
13	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			-	0.1%	0.1%	0.1%	-	n/a	0.1%	0.1%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
14	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan			-	10%	10%	10%	-	10%	10%	10%	
15	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		√	12.08 %	12.08 %	12.08 %	-	13.306 %	n/a	12.08 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
16	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha		√	21.21 %	21.21 %	21.21 %	-	39.43 %	n/a	21.21 %	-	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
17	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		√	-	1%	2%	2%	-	n/a	2%	2%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
18	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		√	-	40%	41%	43%	-	n/a	41%	43%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan
19	Pertumbuhan Wirausaha		√	-	7%	7%	7%	-	n/a	7%	7%	Realisasi capaian pada tahun 2025 masih dalam proses tahun berjalan

Sumber Data: Olahan Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, Diskopukm merupakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, dan efisiensi waktu penyelesaian. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian pelayanan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat;

- c. Memelihara, menata, mengelola asset daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan;
- d. Fokus pada urusan wajib non-pelayanan dasar, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelayanan;
- c. Persaingan dengan Lembaga lain yang sejenis.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil;
2. Persentase Koperasi yang Berkualitas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang bersifat eksternal yang akan menjadi tantangan atau peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, diantaranya adalah : pelemahan ekonomi China yang berpotensi mempengaruhi pasar komoditas secara signifikan, pergeseran struktur kelas Masyarakat di Indonesia, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya Adalah karena kondisi ekonomi makro di Indonesia, dan Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dihadapkan pada berbagai isu strategis yang bersifat eksternal yang akan menjadi tantangan atau peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, diantaranya adalah:

- a. Pelemahan ekonomi China yang berpotensi mempengaruhi pasar komoditas secara signifikan;
- b. Pergeseran struktur kelas Masyarakat di Indonesia;
- c. Dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya Adalah karena kondisi ekonomi makro di Indonesia, dan Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Karakteristik suatu isu strategis Adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan

isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, sebagai berikut :

1. Kota Bekasi memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM yang berdaya saing tinggi, namun sering kali terbentur pada berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta akses pasar yang terbatas;
2. Wirausahawan pemula yang memerlukan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha;
3. Perlunya membangun ekosistem kewirausahaan yang dinamis di daerah;
4. Pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi;
5. Pengalaman para pemilik UMKM perlu diakselerasi dan diperkaya, melalui sharing informasi dari Perusahaan besar melalui program CSR.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2025-2029 adalah : ***“Penguatan Koperasi dan UMKM dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat”***.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sesuai urusan yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;
2. Fasilitasi terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik.

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Fasilitasi legalitas usaha dengan mendorong penerbitan NIB bagi usaha mikro serta fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk UMKM guna memperkuat legalitas usaha,

- meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun jaringan kemitraan serta lebih jauh untuk meningkatkan omzet dan skala usaha UMKM;
2. Melakukan fasilitasi dan berbagai kegiatan pelatihan untuk mencapai UMKM naik kelas;
 3. Melakukan pendekatan kewilayahan yakni melakukan pembinaan terhadap UMKM di tingkat Kecamatan;
 4. Melakukan penetapan Lokasi usaha informal;
 5. Membuka ruang investasi/CSR dalam rangka penataan/revitalisasi lokasi usaha PKL;
 6. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan dan usaha bagi para PKL.

Membuka ruang investasi dan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat meningkatkan ekonomi lokal dan membantu Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkatkan usahanya. Dengan adanya investasi dan CSR, PKL dapat memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas usahanya, seperti pelatihan, teknologi, dan pemasaran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung Program GERAKAN KOBE BERKARYA, yang terdiri dari pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan start up di masing-masing kecamatan pengembangan pola “Bapak Asuh” bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.

Dukungan fasilitasi pemasaran, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan dapat membantu PKL meningkatkan kualitas usahanya dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan adanya dukungan ini, PKL dapat meningkatkan kemampuan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Program ini dapat berdampak positif terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Dengan adanya program ini, kepala daerah dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga dapat berdampak positif terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan SDGs.

Dengan adanya program ini, pemerintah daerah dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, membuka ruang investasi dan CSR serta memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan dapat membantu PKL meningkatkan usahanya dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan RKPD yang disusun benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Menganalisis kesenjangan dan menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi;
3. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
4. Mengintegrasikan hasil analisis kebutuhan ke dalam rancangan RKPD.

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan relevansi dan kesesuaian rancangan RKPD dengan kebutuhan Masyarakat;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Dengan demikian, proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah penting dalam penyempurnaan rancangan RKPD yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				RP 9.331.964.494					RP 9.331.964.494	
			Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 Persen	Rp 20.000.000			Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 Persen	Rp 20.000.000	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88.15 Persen	Rp 8.841.964.494			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88.15 Persen	Rp 8.841.964.494	
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83 Nilai	Rp 60.000.000			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83 Nilai	Rp 60.000.000	
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	94 Persen	Rp 410.000.000			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	94 Persen	Rp 410.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	6 Dokumen	Rp 20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	6 Dokumen	Rp 20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 10.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	Rp 8.355.376.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	Rp 8.355.376.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/Bulan	Rp 8.345.376.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	1.204 Orang/Bulan	Rp 8.345.376.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai NSPK	1 Laporan	Rp 60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai NSPK	1 Laporan	Rp 60.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Rp 60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Rp 60.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	27 Laporan	Rp 476.588.494	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	27 Laporan	Rp 476.588.494	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 116.588.494	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 116.588.494	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai NSPK	12 Laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai NSPK	12 Laporan	Rp 10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 10.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Rp 410.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Rp 410.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 140.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 80.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 80.000.000	
			Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	2.5 %	Rp 80.000.000			Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	2.5 %	Rp 80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 80.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 80.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Rp 80.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Rp 80.000.000	
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 150.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	10 %	Rp 150.000.000			Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10 %	Rp 150.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 150.000.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	Rp 150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 250.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 250.000.000	
			Persentase SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya	8.5%	Rp 250.000.000			Persentase SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya	8.5%	Rp 250.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	300 Orang	Rp 250.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	300 Orang	Rp 250.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	Rp 250.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	Rp 250.000.000	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 467.250.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 467.250.000	
			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2 %	Rp 467.250.000			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2 %	Rp 467.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	235 Unit Usaha	Rp 467.250.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	235 Unit Usaha	Rp 467.250.000	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kota Bekasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan	10 Kelompok Masyarakat	Rp 150.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kota Bekasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan	10 Kelompok Masyarakat	Rp 150.000.000	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	235 Unit Usaha	Rp 317.250.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	235 Unit Usaha	Rp 317.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 500.000.000	
			Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	10 %	Rp 500.000.000			Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	10 %	Rp 500.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	10 Unit Usaha	Rp 500.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	10 Unit Usaha	Rp 500.000.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	Rp 250.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	Rp 250.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	Rp 100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	Rp 100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	Rp 150.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	Rp 150.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Rp 1.750.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Rp 1.750.000.000
			Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	41 % 7 %	Rp 1.750.000.000			Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	41 % 7 %	Rp 1.750.000.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan	455 Unit Usaha	Rp 1.750.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan	455 Unit Usaha	Rp 1.750.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	167 Unit Usaha	Rp 700.000.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	167 Unit Usaha	Rp 700.000.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah yang Difasilitasi	48 Orang	Rp 200.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah yang Difasilitasi	48 Orang	Rp 200.000.000	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	32 Unit Usaha	Rp 200.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	32 Unit Usaha	Rp 200.000.000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	208 Unit Usaha	Rp 650.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	208 Unit Usaha	Rp 650.000.000	
TOTAL PAGU					Rp 12.529.214.494	TOTAL PAGU					Rp 12.529.214.494

Sumber data: Olahan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan Pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Hal ini sesuai dengan Pasal 348 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD berhak untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran untuk penyusunan perencanaan Pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui proses perencanaan partisipatif yang diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, hingga akhirnya dihimpun dan dibahas dalam musrenbang kota. Dalam forum tersebut, Masyarakat, organisasi Masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang dianggap penting untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Seluruh usulan tersebut kemudian dihimpun melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) untuk dilakukan verifikasi, sinkronisasi dengan arah kebijakan serta kesesuaian dengan kewenangan perangkat daerah. Sementara itu, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD dalam kegiatan reses maupun pertemuan langsung dengan konsituen. Usulan pokir tersebut selanjutnya disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), untuk kemudian dilakukan klarifikasi, verifikasi teknis, serta penajaman terhadap prioritas usulan, sehingga diperoleh daftar usulan pokir prioritas yang selaras dengan arah kebijakan Pembangunan daerah, serta memungkinkan untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan.

Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang diakomodir pada prinsipnya diarahkan agar sejalan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopukm). Kesesuaian tersebut antara lain tercermin pada upaya peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM serta fasilitasi sarana dan prasarana usaha khususnya bagi pedagang kecil yang membutuhkan fasilitas pendukung untuk berjualan di ruang publik. Dengan demikian, usulan Pokir yang masuk bukan hanya sekadar memenuhi aspirasi masyarakat melalui DPRD, tetapi juga mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah serta memperkuat kontribusi sektor koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan UMKM	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	41 %	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ● Permohonan kemudahan akses pemasaran produk UMKM ● Permohonan kegiatan pengembangan wirausaha mandiri bagi pelaku usaha informal
			Pertumbuhan Wirausaha	7 %	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOPUKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non *State Actors*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan *goals* periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana Pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan Upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemerantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik-mandiri lainnya;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yaitu mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-3 melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dalam rangka mendukung pencapaian kegiatan prioritas utama, yaitu: (1) pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya, (2) pengembangan dan peningkatan ekosistem digital, (3) penguatan ekosistem aplikasi dan gim, (4) pengembangan koperasi sektor produksi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tujuan Pembangunan jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2025-2029 adalah : “ **Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa dan Industri**”. Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan sasaran yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan “**Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM**”.

Selanjutnya sebagai salah satu instrument monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi setiap tahunnya. Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2026 sesuai Renstra Diskopukm 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada Perdagangan, Jasa dan Industri		Proporsi PDRB Perdagangan	20.01
			Proporsi PDRB Industri Pengolahan	32.85
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1%
			Persentase Koperasi yang Berkualitas	20%

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong yang terjadi dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- Kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Masalah yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM seringkali kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif;
- Kurangnya koordinasi antara dinas dan stakeholders dapat menghambat pelayanan;
- Keterbatasan akses ke pasar, teknologi, dan informasi dapat menghambat perkembangan koperasi dan UMKM.

2. Faktor Pendorong

- Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan koperasi dan UMKM dapat menjadi pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Kerjasama antara dinas, stakeholder, dan Masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan;
- Inovasi dalam pelayanan dan pengembangan koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
- Dukungan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah dirumuskan 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**” antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung Program GERAKAN KOBE BERKARYA, yang terdiri dari pembangunan sentrasentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan start up di masing-masing kecamatan pengembangan pola

“Bapak Asuh” bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berkomitmen untuk berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dirancang untuk mencapai beberapa tujuan SDGs, antara lain:

- Meningkatkan akses pembiayaan dan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil untuk mencapai SDG 1 (Tidak Ada Kemiskinan);
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak melalui pengembangan usaha koperasi dan UKM untuk mencapai SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
- Meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha untuk mencapai SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi juga menjalin kerja sama dan kemitraan dengan stakeholders untuk meningkatkan akses pasar dan sumber daya bagi koperasi dan UKM, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dapat berperan aktif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berupaya untuk mengurangi kemiskinan di Kota Bekasi melalui pengembangan usaha mikro dan kecil. Program-program yang dilaksanakan dinas ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi antara lain:

- Meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil;
- Meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan;
- Meningkatkan akses pasar bagi produk usaha mikro dan kecil;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang memenuhi standar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif

dan efisien kepada Masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dapat dilakukan beberapa diantaranya:

- Standar pelayanan pendaftaran koperasi dan UMKM;
- Standar pelayanan pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM;
- Standar pelayanan bantuan dan fasilitasi bagi koperasi dan UMKM;
- Waktu penyelesaian pendaftaran koperasi dan UMKM;
- Kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM;
- Ketersediaan bantuan dan fasilitasi bagi koperasi dan UMKM.

Pencapaian NSPK dan SPM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak tersebut antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi daerah seperti potensi sektor industri kreatif, sektor pariwisata, sektor pertanian dan Perkebunan, serta sektor jasa dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi juga telah melakukan pengembangan antara lain:

- ◆ Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- ◆ Memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- ◆ Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha;
- ◆ Meningkatkan promosi dan pemasaran produk daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, pada tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari sisi penyebaran lokasi, terdapat program dan kegiatan yang bersifat merata pada seluruh kecamatan/kelurahan sebagai bentuk fasilitasi umum bagi masyarakat, seperti kegiatan pelatihan, pemberdayaan, serta sosialisasi. Sementara itu, terdapat pula kegiatan yang bersifat terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu, seperti fasilitasi penguatan koperasi potensial, pemberian sarana prasarana usaha bagi pelaku UMKM binaan, serta pendampingan kelompok usaha prioritas. Adapun total kebutuhan dana untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pagu indikatif sebesar Rp 12.529.214.494 (Dua belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, Dana Transfer serta potensi sumber pendanaan lain yang sah

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- ◆ Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ◆ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ◆ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ◆ Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ◆ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ◆ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - ◆ Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- ◆ Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - ◆ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
7. Program Pengembangan UMKM
- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- ◆ Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
 - ◆ Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - ◆ Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
 - ◆ Sub Kegiatan Produksi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Rumusan rencana program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	9.331.964.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	9.601.471.334
							Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		88.15%				88.20%	
							Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		83 Nilai				83 Nilai	
							Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		94%				95%	
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	20.000.000	
2	17	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	10.000.000	
2	17	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	10.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Kota Bekasi	2 Laporan	8.355.376.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		2 Laporan	8.454.882.840
2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	1.204 Orang/Bulan	8.345.376.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		1.204 Orang/Bulan	8.444.882.840
2	17	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	10.000.000
2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	210.000.000
2	17	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	10 Orang	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	60.000.000
2	17	01	205	0010	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	- Orang	0			44 Orang	150.000.000
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	476.588.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	476.588.494
2	17	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	7 Paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	300.000.000
2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	15.000.000
2	17	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	25.000.000
2	17	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	116.588.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	116.588.494
2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Bekasi	- Laporan	0			1 Laporan	20.000.000
2	17	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	- Unit	0			2 Unit	20.000.000
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	10.000.000
2	17	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	10.000.000
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	3 Laporan	410.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	410.000.000
2	17	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	13 Unit	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Unit	140.000.000
2	17	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	70.000.000
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	Kota Bekasi	2.5%	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.5%	150.000.000
2	17	02	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110 Unit Usaha	150.000.000
2	17	02	201	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110 Unit Usaha	150.000.000
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	10%	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi Sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	150.000.000
2	17	03	201	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	150.000.000
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Bekasi	8.5%	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.5%	250.000.000
2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Bekasi	250 Orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	250.000.000
2	17	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	250 Orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	250.000.000
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Kota Bekasi	2%	467.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2%	480.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan dan Perlindungan	Kota Bekasi	245 Unit Usaha	467.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245 Unit Usaha	480.000.000
2	17	06	201	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kota Bekasi	10 Kelompok Masyarakat	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Kelompok Masyarakat	150.000.000
2	17	06	201	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kota Bekasi	235 Unit Usaha	317.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		235 Unit Usaha	330.000.000
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Kota Bekasi	10%	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	500.000.000
2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Kota Bekasi	220 Unit Usaha	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		152	500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	07	201	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	- Unit Usaha	0			56 Unit Usaha	100.000.000
2	17	07	201	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	40 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Unit Usaha	250.000.000
2	17	07	201	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- Unit Usaha	0
2	17	07	201	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	30 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56 Orang	150.000.000
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Kota Bekasi	41%	1.750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43%	1.750.000.000
					Pertumbuhan Wirausaha	7%		7%					
2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan	Kota Bekasi	41 Unit Usaha	1.750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		401 Unit Usaha	1.750.000.000
2	17	08	201	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Bekasi	167 Unit Usaha	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167 Unit Usaha	700.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	08	201	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Bekasi	48 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Unit Usaha	200.000.000
2	17	08	201	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Bekasi	32 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32 Unit Usaha	200.000.000
2	17	08	201	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi	Kota Bekasi	208 Unit Usaha	650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		208 Unit Usaha	650.000.000
TOTAL								Rp	12.529.214.494			Rp	12.881.471.334

Sumber data: Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 disusun berdasarkan:

- a. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- c. Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun total pendanaannya untuk program dan kegiatan Diskopukm Kota Bekasi Tahun 2026 yang memiliki 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan, 26 (dua puluh enam) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp 12.529.214.494,- (*Dua belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), sumber pendanaan dari APBD Kota Bekasi. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026 berikut pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	8.957.210.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan SILPA
						IKP.2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		88.15%		
						IKP.3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		83 Nilai		
						IKP.4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		94%		
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Dokumen	18.000.000		
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai NSPK	Kota Bekasi	2 Laporan	7.884.622.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	1.204 Orang/Bulan	7.879.622.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU	
2	17	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	60.000.000		
2	17	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	12 Orang	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Kota Bekasi	27 Laporan	406.558.494		
2	17	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Paket	260.000.000	SILPA	
2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	15.000.000	SILPA	
2	17	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	15.000.000	SILPA	
2	17	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000	SILPA	
2	17	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	91.588.494	SILPA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai NSPK	Kota Bekasi	12 Laporan	178.000.000		
2	17	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	178.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	3 Laporan	410.000.000		
2	17	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000	SILPA	
2	17	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	13 Unit	140.000.000	SILPA	
2	17	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	70.000.000	SILPA	
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	Kota Bekasi	2.5%	60.000.000		
2	17	02	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi penerbitan NIB Usaha Simpan Pinjam	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	60.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	02	201	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	10%	124.000.000		
2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	124.000.000		
2	17	03	201	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	124.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Bekasi	8.5%	202.000.000		
2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Bekasi	300 Orang	202.000.000		
2	17	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	300 Orang	202.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Kota Bekasi	2%	406.424.500		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam Pemberdayaan dan Perlindungan	Kota Bekasi	235 Unit Usaha	406.424.500		
2	17	06	201	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan	Kota Bekasi	10 Kelompok Masyarakat	141.674.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	06	201	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kota Bekasi	235 Unit Usaha	264.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Kota Bekasi	10%	472.000.000		
2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Kota Bekasi	10%	472.000.000		
2	17	07	201	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	40 Unit Usaha	232.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	07	201	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Bekasi	150 Unit Usaha	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	07	201	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	30 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal dan Formal	Kota Bekasi	41%	2.948.000.000		
						Pertumbuhan Wirausaha		7%			
2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan	Kota Bekasi	455 Unit	2.948.000.000		
2	17	08	201	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Bekasi	167 Unit Usaha	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	08	201	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kota Bekasi	48 Orang	1.403.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8	201	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Bekasi	32 Unit Usaha	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8	201	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Bekasi	208 Unit Usaha	645.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
							TOTAL	Rp	13.169.634.994		

Sumber data: Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026 memuat program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja disusun berpedoman kepada Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel. Disamping itu Rencana Kerja juga merupakan tolak ukur capaian kinerja baik yang dilakukan secara individu, tim maupun institusi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Kami berharap rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Bekasi, 13 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. Rita Hartati., M.M
NIP. 196806281994038012